



LAPORAN

TINDAK LANJUT TIGA UNSUR TERENDAH

DALAM SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

TRIWULAN IV (PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2025)

TINDAK LANJUT TIGA UNSUR TERENDAH DAN REKOMENDASI HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAkJ TRI WULAN IV TAHUN 2025)

Berdasarkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAkJ), Pengadilan Negeri Yogyakarta Triwulan IV Tahun 2025 berada pada kategori Bersih dari Korupsi.

Namun demikian, terdapat tiga unsur dengan nilai terendah yang memerlukan tindak lanjut dan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan, sebagai berikut:

A. Praktik Percaloan

Tindak Lanjut:

1. Melakukan penguatan pengawasan internal melalui monitoring berkala di area pelayanan.
2. Memasang media informasi larangan percaloan dan gratifikasi di area strategis.
3. Mengoptimalkan peran petugas PTSP dan petugas keamanan dalam mencegah praktik percaloan.

Rekomendasi:

1. Peningkatan sosialisasi layanan resmi pengadilan kepada masyarakat.
2. Penegakan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan percaloan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan interaksi langsung yang berpotensi disalahgunakan.

B. Persyaratan di Luar Prosedur

Tindak Lanjut:

1. Melakukan evaluasi dan standarisasi persyaratan layanan sesuai SOP yang berlaku.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan prosedur layanan.
3. Menyediakan informasi persyaratan layanan secara terbuka dan mudah diakses.

Rekomendasi:

1. Penyederhanaan alur dan persyaratan layanan.
2. Pembaruan informasi layanan secara berkala melalui media cetak dan digital.
3. Peningkatan pemahaman petugas terhadap SOP pelayanan.

C. Diskriminasi Pelayanan

Tindak Lanjut:

1. Memberikan pembinaan kepada seluruh petugas terkait pelayanan prima dan non-diskriminatif.
2. Meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan pelayanan.
3. Menyediakan sarana pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.

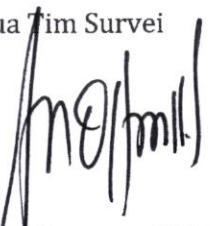
Rekomendasi:

1. Pelatihan etika pelayanan dan anti diskriminasi bagi seluruh aparatur.
2. Penguatan budaya pelayanan yang adil, transparan, dan inklusif.
3. Evaluasi berkala terhadap kinerja pelayanan berdasarkan umpan balik pengguna layanan.

Dengan dilaksanakannya tindak lanjut dan rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta semakin meningkat serta mampu mempertahankan dan memperkuat predikat Bersih dari Korupsi.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Ketua Tim Survei


Andang Catur Prasetya, S.H., M.H

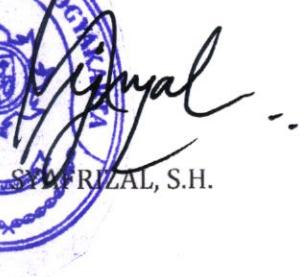
Sekertaris Survei


Nindya Yosdal Putra

Mengetahui

 Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta




SYAUF RIZAL, S.H.